

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nurmala

Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang

Email : Nurmalabahamid@gmail.com

Resi Puspita Sari

Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang

Email : pratiwiannisa34@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak kendaraan bermotor pada badan pendapatan daerah di provinsi sumatera selatan dengan adanya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat menunjang pembangunan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan pajak terdiri dari: pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, dan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan indikator rasio efektivitas dan kontribusi, metode yang digunakan adalah metode penilitian kualitatif, sumber data yang diperoleh dari sumber sekunder. Teknik pengumpulan data di peroleh dari dokumentasi, studi pustaka sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan rasio efektivitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kabupaten/kota yang ada di provinsi sumatera selatan, dari tahun 2012-2016 berdasarkan kriteria rasio efektivitas Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No.690.900.327 menunjukkan kriteria sebesar 100% **Sudah Efektif**. Berdasarkan kontribusi dari 15 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah , secara keseluruhan dari tahun 2011-2016 berdasarkan kriteria kontribusi yang dikeluarkan tim litbang degdagri-fisipol UGM tahun 1991 dengan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 28,71% dengan kriteia 20,10%-30% **Sedang**.

Saran diharapkan bagi pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi sosialisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan. Untuk pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota agar memberi pelayanan yang mudah dan efisien dalam melakukan pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Kata Kunci : PKB, PAD

PENDAHULUAN

Di era diberlakukannya otonomi daerah di indonesia berlaku di tanggal 1 januari 2001 menghendaki daerah untuk berupaya secara optimal mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan bangunan.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang

Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut samudra (2015:54) merupakan

pendapatan terpenting yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan daerah dan pembangunan daerah yang lebih maju. Oleh karena itu pelaksanaan dan pengelolanya harus dilakukan dengan baik dalam hal ini dibutuhkan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien guna mencapai tujuan daerah yang maksimal.

Pajak daerah menurut siahaan (2010:7) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

Pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang bergerak oleh peralatan teknik yang ada pada kendaran dan biasanya digunakan untuk orang dan barang selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel.

Pajak kendaraan bermotor sangat besar peranannya bagi pendapatan asli daerah hal ini sangat penting sekali pada saat sekarang, di mana tiap daerah di Indonesia diharapkan dapat menghimpun dana sendiri untuk pembiayaan daerahnya

masing-masing dengan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dapat kita lihat bersama kecenderungan yang ada pada saat ini daerah-daerah di Indonesia mencoba untuk menganjurkan kepada masyarakat di daerahnya untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerahnya masing-masing atau membalik namakan kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat tinggalnya. Hal ini dimaksudkan agar pajak yang dibayar oleh pemilik kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dapat dimanfaatkan bagi dana pembangunan di daerah tersebut.

Tabel.1

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2011-2015

| No | Tahun | Target | Realisasi | Persen % |
|----|-------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | 2012 | 489.243.745.000 | 508.202.999.902 | 103,88 |
| 2 | 2013 | 577.307.600.000 | 594.502.405.046 | 102,98 |
| 3 | 2014 | 663.903.700.000 | 663.422.958.598 | 99,93 |
| 4 | 2015 | 812.902.152.908 | 749.169.627.264 | 92,16 |
| 5 | 2016 | 775.275.400.742 | 785.782.252.496 | 101,36 |

Sumber : Bapenda Provinsi Sumsel

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat target dan realisasi pajak kendaraan bermotor yaitu: Pada tahun 2012 target sebesar 489.243.745.000 Realisasi 508.202.999.902 melebihi target sebesar 103,88%, pada tahun 2013 target 577.307.600.000 realisasi 594.502.405.046 sebesar 102,98%, dan pada tahun 2014 target 663.903.700.000 dengan realisasi 663.422.958.598 mengalami penurunan sebesar 99,93%, pada tahun 2015 target 812.902.152.908 dengan realisasi 749.169.627.264 terjadi penurunan lagi sebesar 92,16%, sedangkan pada tahun 2016 Target 775.275.400.742 dengan realisasi 785.782.252.496 mengalami peningkatan kembali sebesar 101,36%. Pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan maupun penurunan setiap tahunnya.

Mengingat pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu potensi data penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah namun, masih ditemuin pajak kendaraan bermotor yang menunggak dan ditemui pemilik

kendaraan yang belum membalik nama kendaraan yang berasal dari daerah di luar provinsi Sumatera selatan.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik dengan judul **Analisis Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.**

Agar permasalahan dalam penelitian tidak menyimpang dari sasaran maka perlunya adanya pembatasan masalah yaitu Analisis Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Dari tahun 2012 Sampai 2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerimaan Pajak Kendaraan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Sutedi (2011:2) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Fungsi Pajak

Menurut Burton (2011:12) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam sosial dan ekonomi.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain :

1. Daerah Otonom Selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat berhak mengurus urusan pemerintahan.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dan badan usaha milik negara (BUMN).
4. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi bayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak kewajiban perpajakan sesuai dengan

peraturan undang-undang yang berlaku.

Menurut Darwin (2010:99) pajak daerah secara umum adalah pajak yang di pungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Sedangkan Menurut Siahaan (2010:7) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dapat disimpulkan pajak daerah adalah pajak yang di pungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan daerah untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak dan Objek Pajak

Menurut Samudra (2015:52) pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak air permukaan ; dan
- e. Pajak rokok

METODOLOG PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif ,untuk mengetahui penerimaan pajak Kendaraan Bermotor dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah di propinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kabupaten kota yang ada di propinsi Sumatera Selatan .

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada badan pendapatan daerah

provinsi sumatera Selatan, yang terdiri dari 21 kabupaten/kota dan sampel dalam penelitian ini adalah pada penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama 5 tahun priode 2012- 2016 yang memenuhi kretria hanya 15 kabupaten/kota pada pendapatan daerah provinsi sumatera Selatan. **Teknik Analisis Data** digunakan dalam penelitian ini yaitu **rasio efektivitas dan analisis kontribusi**.

1. Rasio efektivitas

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatagorikan efektif apabila rasio yang mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 (seratus) persen namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Hubungan antara realisasi penerimaan pajak kendaran bermotor terhadap target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan apakah besarnya pajak kendaraan bermotor sesuai dengan taerget yang ada. Besarnya efektivitas pajak kendaraan bermotor dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan PKB}}$$

Sumber : Abdul Halim (2012:L-6)

Tabel. 2
Interpretasi Kriteria Efektivitas

| Presentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| >100% | Sangat Baik |
| 90%-100% | Efektif |
| 80%-90% | Cukup Efektif |
| 60%-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber : Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No.690.900.327

1. Analisis Kontribusi

Dengan analisis ini kita akan mendapat seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dan akan diketahui kontribusi yang terbesar maupun terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak kendaraan bermotor dalam menyumbang

kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : Abdul Halim (2012:45)

Tabel.3

Interpretasi Kriteria Kontribusi

| Presentase | Kriteria |
|------------|---------------|
| 0,00%-10% | Sangat Kurang |
| 10,10%-20% | Kurang |
| 20,10%-30% | Sedang |
| 30,10%-40% | Cukup Baik |
| 40,10%-50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

Sumber : Tim Litbang Degdagri-Fisipol UGM Tahun 1991

HASIL PENELITIAN

Badan pendapatan daerah provinsi sumatera selatan yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak daerah, retribusi, bagi hasil pajak, dan dan perimbangan. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang di pungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat.

1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Berikut ini data target dan realisasi pajak daerah di badan pendapatan daerah provinsi sumatera selatan. Di penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai pembanguna memerlukan dana adapun sumber dana salah satu di dapat dari sektor pajak, khususnya di daerah seperti: pajak rokok, pajak bahan bakar bermotor, pajak air permukaan, pajak air tanah, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam bukan batuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tabel.4

Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015

| Tahun | Target | Realisasi | Persen % |
|-------|----------------------|----------------------|----------|
| 2011 | 1.513.311.345.000,00 | 1.617.518.571.681,25 | 110,45 |
| 2012 | 1.731.326.700.000,00 | 1.803.818.849.293,00 | 104,19 |
| 2013 | 1.999.720.400.000,00 | 1.882.596.918.640,00 | 94,14 |
| 2014 | 2.425.320.400.000,00 | 2.267.779.726.033,50 | 93,50 |
| 2015 | 2.510.784.537.684,00 | 2.324.865.133.161,95 | 92,60 |

Sumber : Hasil Olahan data Bapenda Provinsi Sumsel

Dari tabel diatas, terlihat jelas bahwa penerimaan pajak daerah dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 sebesar 110,45% ,sedangkan tahun 2013 sebesar 104,19% mengalami penurunan sebesar 6,26%, di tahun 2014 sebesar 94,14% mengalami peningkatan 10,05%, tahun 2015 sebesar 93,50% mengalami penurunan 0,64%, dan tahun 2016 sebesar 92,60% mengalami penurunan kembali 0,9%, setiap tahunnya pajak daerah mengalami penurunan.

Tabel.5

Data Target Pendapatan Asli Daerah Dibadan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012-2016

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Pajak Daerah | 1.513.311.345.000,00 | 1.731.326.700.000,00 | 1.999.720.400.000,00 | 2.425.320.400.000,00 | 2.510.784.537.684,00 |
| 2 | Retribusi | 13.133.650.000,00 | 15.958.740.500,00 | 16.771.950.000,00 | 13.141.360.500,00 | 13.495.183.575,00 |
| 3 | Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 73.136.000.000,00 | 87.969.000,00 | 92.935.500.000,00 | 49.508.322.803,00 | 197.697.165.022,00 |
| 4 | Lain-LainPAD yang Sah | 87.714.620.400,00 | 72.454.641.176,00 | 104.992.395.000,00 | 107.754.005.000,00 | 150.000.009.999,09 |

| | | | | | |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Jumlah | 1.687.295.615.400,00 | 1.907.709.081.676,00 | 2.214.420.245.000,00 | 2.595.724.088.303,00 | 2.871.976.896.280,00 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Sumber : Hasil Olahan data Bapenda Provinsi Sumsel

1. Analisis Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan

pemerintah daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah.

Tabel.6
Perhitungan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016

| No | Keterangan | Tahun | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Palembang 1 | 103,68% | 102,82% | 101,03% | 100,40% | 104,09% |
| 2 | Muba 1 | 106,24% | 101,86% | 101,56% | 95,65% | 98,48% |
| 3 | Bayuasin | 107,24% | 110,51% | 105,43% | 99,34% | 96,68% |
| 4 | Oki 1 | 103,80% | 99,87% | 97,20% | 79,14% | 96,14% |
| 5 | Ogan Ilir | 107,11% | 106,49% | 105,12% | 96,86% | 100,58% |
| 6 | Oku | 103,33% | 101,75% | 97,15% | 83,25% | 97,30% |
| 7 | Oku Selatan | 105,64% | 114,69% | 101,76% | 91,00% | 99,84% |
| 8 | Oku timur 1 | 104,16% | 104,67% | 95,08% | 61,63% | 93,81% |
| 9 | Muara Enim | 102,93% | 99,06% | 95,86% | 81,16% | 101,00% |
| 10 | Prabumulih | 100,17% | 107,60% | 96,58% | 87,25% | 96,86% |
| 11 | Lahat | 110,25% | 110,98% | 98,33% | 92,93% | 103,19% |
| 12 | Pagar Alam | 104,16% | 106,45% | 104,85% | 94,69% | 104,18% |
| 13 | Musi rawas | 100,29% | 94,73% | 91,70% | 72,11% | 96,30% |
| 14 | Lubuk Linggau | 103,39% | 98,97% | 97,08% | 83,64% | 100,14% |
| 15 | Empat Lawang | 101,66% | 110,91% | 105,21% | 86,99% | 100,73% |
| Total Rata-rata | | 104,27% | 104,75% | 99,59% | 87,06% | 99,28% |

Sumber : Hasil Olahan Data Bapenda Provinsi Sumsel

Dari tabel 13 di atas menjelaskan bahwa dari hasil perhitungan palembang 1 pada tahun 2012 sebesar 103,68%, tahun 2013 sebesar 102,82% mengalami penurunan 0,86%, di tahun sebesar 2014 sebesar 101,03% mengalami penurunan 1,79%, tahun 2015 sebesar 100,40% terjadi penurunan kembali 0,63% , sedangkan tahun 2016 sebesar 104,09% mengalami peningkatan 3,69%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 102,40% **Sangat Baik. Muba 1**

pada tahun 2012 sebesar 106,24% , tahun 2013 sebesar 101,86 mengalami penurunan 4,38%, di tahun 2014 sebesar 101,56% mengalami penurunan 0,3%, tahun 2015 sebesar 95,65% mengalami penurunan kembali 5,91%, dan tahun 2016 sebesar 98,48% mengalami peningkatan 2,82%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 100,75% **Sangat Baik.**

Banyuasin pada tahun 2012 sebesar 107,24%, tahun 2013 sebesar 110,51%

mengalami peningkatan 3,27%, di tahun sebesar 2014 sebesar 105,43% menurun 5,081%, tahun 2015 sebesar 99,34% terjadi penurunan kembali 6,09%, di tahun 2016 sebesar 96,68% mengalami penurunan 2,66%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 103,84% **Sangat Baik**.

Ogan Komering Ilir 1 pada tahun 2012 sebesar 103,80%, tahun 2013 sebesar 99,87% mengalami penurunan 3,93%, di tahun sebesar 2013 sebesar 97,20% menurun 2,67%, tahun 2014 sebesar 79,14% menurun kembali 18,06%, sedangkan tahun 2015 sebesar 96,15% mengalami peningkatan 17%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 95,23% **Cukup Efektif**. **Ogan Ilir** pada tahun 2012 sebesar 107,11%, tahun 2013 sebesar 106,11% mengalami penurunan 0,62%, di tahun sebesar 2014 sebesar 105,12% penurunan 1,37%, tahun 2015 sebesar 96,86% mengalami penurunan kembali 8,26%, dan tahun 2016 sebesar 100,58% mengalami peningkatan 3,27%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 103,23% **Sangat Baik**.

Ogan Komering Ulu pada tahun 2012 sebesar 103,33%, tahun 2013 sebesar 101,75% mengalami penurunan 1,58%, di tahun sebesar 2014 sebesar 97,15% menurun 4,6%, tahun 2015 sebesar 83,25% penurunan kembali 13,9%, di tahun 2016 sebesar 97,30% mengalami peningkatan 14,05%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 96,55% **Cukup Efektif**.

Oku Selatan pada tahun 2012 sebesar 105,64%, tahun 2013 sebesar 101,76% mengalami peningkatan 9,05%, di tahun sebesar 2014 sebesar 101,76% terjadi

penurunan 12,93%, tahun 2015 sebesar 91,00% menurun 10,76%, dan tahun 2016 sebesar 99,84% meningkat 8,84%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 102,58% **Sangat Baik**. **Oku Timur 1** pada tahun 2012 sebesar 104,16%, tahun 2013 sebesar 104,67% mengalami peningkatan 0,51%, di tahun sebesar 2014 sebesar 95,108% menurun 9,59%, tahun 2015 sebesar 61,63% terjadi penurunan lagi 33,45, sedangkan tahun 2016 sebesar 93,810% mengalami peningkatan 32,18%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 91,87% **Cukup Efektif**.

Muara Enim pada tahun 2012 sebesar 102,93%, tahun 2013 sebesar 99,06% mengalami penurunan 3,87%, di tahun sebesar 2014 sebesar 95,68% penurunan 3,2%, tahun 2015 sebesar 81,16% mengalami penurunan 14,7%, dan tahun 2016 sebesar 101,00% mengalami peningkatan 19,84%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 96,00% **Cukup Efektif**.

Prabumulih pada tahun 2012 sebesar 100,17%, tahun 2013 sebesar 107,60% mengalami peningkatan 7,43%, di tahun sebesar 2014 sebesar 96,58% terjadi penurunan 11,02%, tahun 2015 sebesar 87,25% penurunan kembali 9,33%, di tahun 2016 sebesar 96,86% mengalami peningkatan 9,61%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 97,69% **Cukup Efektif**.

Lahat pada tahun 2012 sebesar 110,25%, tahun 2013 sebesar 110,98% mengalami peningkatan 0,73%, di tahun sebesar 2014 sebesar 98,33% penurunan 12,65%, tahun 2015 sebesar 92,93% penurunan kembali 5,4%, sedangkan tahun 2016 sebesar 103,19% meningkat 10,26%.

Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 103,13% **Sangat Baik**.

Pagar Alam pada tahun 2012 sebesar 104,16%, tahun 2013 sebesar 106,45% mengalami peningkatan 2,29%, di tahun sebesar 2014 sebesar 104,85% penurunan 1,6%, tahun 2015 sebesar 94,69% mengalami peningkatan 10,16%, di tahun 2016 sebesar 104,18% mengalami peningkatan 9,49%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 102,86% **Sangat Baik**.

Musi Rawas pada tahun 2012 sebesar 100,29%, tahun 2013 sebesar 94,73% terjadi penurunan 5,56%, di tahun sebesar 2014 sebesar 91,70% penurunan 3,03%, tahun 2015 sebesar 72,11% penurunan kembali 14,59%, di tahun 2016 sebesar 96,30% mengalami peningkatan 24,19%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 91,02% **Cukup Efektif**.

Lubuk Linggau pada tahun 2012 sebesar 103,39%, tahun 2013 sebesar 98,97% mengalami penurunan 4,4%, di tahun sebesar 2014 sebesar 97,08% terjadi penurunan 1,89%, tahun 2015 sebesar

83,64% penurunan kembali 1,44%, di tahun 2016 sebesar 100,14% mengalami peningkatan 16,5%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 96,64% **Cukup Efektif**.

Empat Lawang pada tahun 2012 sebesar 101,66%, tahun 2013 sebesar 110,91% mengalami peningkatan 9,25%, di tahun sebesar 2014 sebesar 105,21% mengalami penurunan 5,7%, tahun 2015 sebesar 86,99% terjadi penurunan kembali 18,22%, di tahun 2016 sebesar 100,73% mengalami peningkatan 13,74%. Hasil ini menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria persentase 101,09% **Sangat Baik**.

Berdasarkan rasio efektivitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera selatan, dari tahun 2012-2016 berdasarkan kriteria rasio efektivitas Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No.690.900.327 menunjukkan kriteria sebesar 100% **Sudah Efektif**.

2. Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2016

Tabel.7

Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016

| No | Keterangan | Tahun | | | | |
|----|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Palembang 1 | 14,89% | 16,04% | 15,08% | 14,35% | 14,79% |
| 2 | Muba 1 | 1,20% | 1,29% | 1,43% | 1,23% | 1,18% |
| 3 | Bayuasin | 0,10% | 1,14% | 1,35% | 1,35% | 1,34% |
| 4 | Oki 1 | 1,20% | 1,27% | 1,38% | 0,98% | 0,90% |
| 5 | Ogan ilir | 0,50% | 0,57% | 0,64% | 0,64% | 0,62% |
| 6 | Oku | 0,11% | 1,20% | 0,13% | 1,17% | 1,13% |
| 7 | Oku Selatan | 0,22% | 0,02% | 0,32% | 0,30% | 0,30% |
| 8 | Oku Timur 1 | 1,29% | 1,41% | 1,50% | 0,78% | 0,70% |
| 9 | Muara Enim | 1,90% | 2,0% | 2,15% | 1,93% | 1,87% |
| 10 | Prabumulih | 1,01% | 1,17% | 1,25% | 1,15% | 1,12% |
| 11 | Lahat | 0,89% | 1,02% | 1,12% | 1,09% | 1,08% |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | Pagar alam | 0,20% | 0,23% | 0,02% | 0,25% | 0,25% |
| 13 | Musi rawas | 0,99% | 0,97% | 1,01% | 0,89% | 0,78% |
| 14 | Lubuk Linggau | 0,92% | 0,97% | 1,04% | 0,95% | 0,98% |
| 15 | Empat Lawang | 0,10% | 0,12% | 0,14% | 0,13% | 0,14% |
| Total | | 25,52% | 29,58% | 30,46% | 29,00% | 28,99% |

Sumber : Hasil Olahan Data Bapenda Provinsi Sumsel

Dilihat pada tabel 14 di atas menjelaskan bahwa dari hasil perhitungan Palembang 1 pada tahun 2012 sebesar 14,89%, tahun 2013 sebesar 16,04% mengalami peningkatan 1,15%, di tahun sebesar 2014 sebesar 15,08% mengalami penurunan 0,96%, tahun 2015 sebesar 14,35% terjadi penurunan kembali 0,73% , sedangkan tahun 2016 sebesar 14,79% mengalami peningkatan 0,44% . Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 15,03% **Kurang. Muba 1** pada tahun 2012 sebesar 1,20%, tahun 2013 sebesar 1,29 mengalami penurunan 0,09%, di tahun sebesar 2014 sebesar 1,43% peningkatan 0,14%, tahun 2015 sebesar 1,23% terjadi penurunan 0,2%, di tahun 2016 sebesar 1,18% kembali penurunan 0,05%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 1,26% **Sangat Kurang.**

Bayuasin pada tahun 2012 sebesar 0,10%, tahun 2013 sebesar 1,14% mengalami peningkatan 1,04%, di tahun sebesar 2014 sebesar 1,35% meningkat kembali 1,21%, tahun 2015 sebesar 1,35% dengan 1,21%, di tahun 2016 sebesar 1,34% terjadi penurunan. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 1,05% **Sangat Kurang.**

Ogan Komering Ilir 1 pada tahun 2012 sebesar 1,20% mengalami peningkatan 0,07%, tahun 2013 sebesar 1,27% meningkat kembali 0,11%, di tahun sebesar 2014 sebesar 1,38% penurunan 0,4%, tahun 2015 sebesar 0,98%, di tahun 2016 sebesar 0,90% terjadi penurunan

kembali 0,08%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah 1,14% **Sangat Kurang.**

Ogan Ilir pada tahun 2012 sebesar 0,50%, tahun 2013 sebesar 0,57% mengalami peningkatan 0,07%, di tahun sebesar 2014 sebesar 0,64% meningkat kembali 0,07%, tahun 2015 sebesar 0,64% dengan 0,07%, di tahun 2016 sebesar 0,62% terjadi penurunan 0,02%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 10,59% **Sangat Kurang.**

Ogan Komering Ulu pada tahun 2012 sebesar 0,11%, tahun 2013 sebesar 1,20% mengalami peningkatan 1,09%, di tahun sebesar 2014 sebesar 0,13% mengalami penurunan 1,07%, tahun 2015 sebesar 1,17% terjadi peningkatan 1,04%, di tahun 2016 sebesar 1,13% mengalami penurunan 0,04%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 0,74% **Sangat Kurang.**

Oku Selatan pada tahun 2012 sebesar 0,22%, tahun 2013 sebesar 0,028% mengalami penurunan 0,192%, di tahun sebesar 2014 sebesar 0,32% penurunan kembali 0,292%, tahun 2015 sebesar 0,30% penurunan 0,02%, di tahun 2016 sebesar 0,30% dengan 0,02%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 0,19% **Sangat Kurang.**

Oku Timur 1 pada tahun 2012 sebesar 1,29%, tahun 2013 sebesar 1,41% mengalami peningkatan 0,12%, di tahun sebesar 2014 sebesar 1,50% meningkat kembali 0,09%, tahun 2015 sebesar 0,78%

penurunan 0,72%, di tahun 2016 sebesar 0,70% terjadi penurunan kembali 0,08%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 1,13% **Sangat Kurang**.

Muara Enim pada tahun 2012 sebesar 1,90%, tahun 2013 sebesar 2,0% mengalami peningkatan 0,10%, di tahun sebesar 2014 sebesar 2,15% meningkat kembali 0,15%, tahun 2015 sebesar 1,93% penurunan 0,22%, di tahun 2016 sebesar 1,87% terjadi penurunan kembali 0,06%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase dengan kriteria presentase 1,97% **Sangat Kurang**.

Prabumulih pada tahun 2012 sebesar 1,01%, tahun 2013 sebesar 1,17% mengalami peningkatan 0,16%, di tahun sebesar 2014 sebesar 1,25% meningkat kembali 0,08%, tahun 2015 sebesar 1,15% penurunan 0,10%, di tahun 2016 sebesar 1,12% terjadi penurunan kembali 0,03%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 1,14% **Sangat Kurang**.

Lahat pada tahun 2012 sebesar 0,89%, tahun 2013 sebesar 1,02% meningkat 0,13%, di tahun sebesar 2014 sebesar 1,12% meningkat kembali 0,10%, tahun 2015 sebesar 1,09% penurunan 0,03%, di tahun 2016 sebesar 1,08% penurunan kembali 0,01%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 1,04% **Sangat Kurang**.

Pagar Alam pada tahun 2012 sebesar 0,20%, tahun 2013 sebesar 0,23% mengalami peningkatan 0,03%, di tahun sebesar 2013 sebesar 0,02% penurunan 0,21%, tahun 2014 sebesar 0,25% mengalami peningkatan 0,23%, di tahun 2015 sebesar 0,25% 2016 dengan 0,25%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor

terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 0,19% **Sangat Kurang**.

Musi Rawas pada tahun 2012 sebesar 0,99%, tahun 2013 sebesar 0,97% mengalami penurunan 0,02%, di tahun sebesar 2014 sebesar 1,01% peningkatan 0,04%, tahun 2015 sebesar 0,89% penurunan 0,12%, di tahun 2016 sebesar 0,78% penurunan kembali 0,11%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 0,94% **Sangat Kurang**.

Lubuk Linggau pada tahun 2012 sebesar 0,92%, tahun 2013 sebesar 0,97% meningkat 0,05%, di tahun sebesar 2014 sebesar 1,04% meningkat kembali 0,07%, tahun 2015 sebesar 0,95% penurunan 0,06%, di tahun 2016 sebesar 0,98% terjadi peningkatan 0,03%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 0,97% **Sangat Kurang**.

Empat Lawang pada tahun 2012 sebesar 0,10%, tahun 2013 sebesar 0,12% mengalami peningkatan 0,02%, di tahun sebesar 2014 sebesar 0,14% meningkat kembali 0,02%, tahun 2015 sebesar 0,13% penurunan 0,01%, di tahun 2016 sebesar 0,14% mengalami peningkatan 0,01%. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan asli daerah dengan kriteria presentase 0,12% **Sangat Kurang**.

Berdasarkan kontribusi dari 15 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, secara keseluruhan dari tahun 2012-2016 berdasarkan kriteria kontribusi yang dikeluarkan timlitbang degdagri-fisipol UGM tahun 1991 dengan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 28,71 % dengan kriteria 20,10%-30% **Sedang**.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan rasio efektivitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kabupaten/kota yang

ada di provinsi sumatera selatan , dari tahun 2012-2016 berdasarkan kriteria rasio efektivitas Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri No.690.900.327 menunjukkan kriteria sebesar 100% **Sudah Efektif.**

2. **Berdasarkan kontribusi** dari 15 kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, secara keseluruhan dari tahun 2011-2015 berdasarkan kriteria kontribusi yang dikeluarkan timlitbang degdagri-fisipol UGM tahun 1991 dengan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 28,71% dengan kriteria 20,10%-30% **Sedang.**

SARAN

1. Diharapkan bagi pemerintah daerah lebih meningkatkan lagi sosialisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.
2. Untuk pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota agar memberi pelayanan yang mudah dan efisien dalam melakukan pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Richard, Dkk. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Departemen Dalam Negeri. 1996. *Keputusan Dalam Negeri No.690.900.327 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pusat Penelitian Universitas PGRI. 2017. *Pedoman penelitian Dosen universitas PGRI Palembang*.
- Fisipol UGM. 1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab. Laporan Akhir Penelitian Litbang Depdagri*. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2014. *Perpajakan Konsep Aplikasi Contoh dan Kasus*. Jakarta: Selemba Empat.
- Mareta, Hesti Meilina. 2015. *Analisis Efektevitas Dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Selatan*. Skripsi, FE Dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Andy.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Uraian dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Nasyirah. 2012. *Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah dan Kaitannya Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Kota Palembang*. FE UPGRIPalembang. (Tidak Untuk Dipublikasikan).

- Rasdianto, Dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Selemba Empat.
- Rizan, Wiryana Nita. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi, FE Universitas PGRI Palembang.
- Samudra, Azahri Aziz. 2015. *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.